

## **BAB III**

### **DINAMIKA PERLAWANAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI**

#### **KULON PROGO**

Pada bab ini akan menarasikan bagaimana dinamika perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo yang sudah berjuang menolak pertambang pasir besi di daerah lahan pantai yang sudah memasuki umur perjuangan 13 tahun. Banyak sekali strategi perlawanan yang telah dilakukan untuk melawan pihak PT JMI dan antek-anteknya. Konsisten dan semangat mandiri selalu dijadikan pedoman sebagai jalannya organisasi. Serta harapan untuk mempertahankan lingkungan yang baik untuk para generasi muda selalu menjadi penyemangat Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo.

Dilihat dari dinamika perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai selama beberapa tahun terakhir, Paguyuban Petani Lahan Pantai sebagai organisasi mempunyai 3 (tiga) karakteristik. Karakteristik tersebut yaitu bisa sebagai gerakan reforma agraria, gerakan sosial dan politik keseharian (*daily politics*). Penjelasannya sebagai berikut :

#### **Reforma Agraria**

Di Indonesia, agraria masih dimaknai dengan makna yang sempit, yaitu tentang pertanian. Reforma agraria melibatkan perubahan fungsi dan juga perubahan struktur (Wiradi, 2000:59). Jika Reforma Agraria disatukan maka menjadi perubahan fungsi pertanian. UUPA ada sebagai dasar lahirnya reforma agraria di Indonesia. Namun sepertinya UUPA pada masa sekarang tidak lagi

diterapkan dengan baik seperti adanya klaim Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman.

### **1. Dinamika Tanah Kasultanan dan Tanah Paku Alam**

Di Indonesia, sejarah pengaturan macam-macam hak penguasaan atas tanah yang ada dalam hukum tata kelola pertanahan atau agraria ada 3 perangkat hukum. Perangkat hukum tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum dari Bekas Swaparja dan hukum pertanahan/agraria adat. (Aditjondro, 2011). *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten adalah salah satu contoh dari hukum Bekas Swaparja.

Tanah Kasultanan atau lebih dikenal dengan *Sultan Ground* dan Tanah Paku Alam atau yang dikenal dengan *Pakualaman Gound* sudah ada di tahun 1900-an. Pengaturan penguasaan atas tanah tersebut terkandung dalam *Rijksblad* atau peraturan kerajaan maupun kadipaten. Pengaturan penguasaan tanah tersebut dibuktikan dengan adanya *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten. Dalam *Rijksblad* Kasultanan No. 16/1918 dan *Rijksblad* Kadipaten No. 18/1918 terdapat poin yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten. (Aditjondro, 2011). Hukum *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten pada saat itu masih berlaku untuk hukum pengaturan penguasaan tanah berlaku khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia mempunyai hukum khusus untuk mengatur tata kelola pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan. UUPA merupakan alat penting untuk mewujudkan tata

kelola pertanahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mengingat bahwa UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disusun dan telah diundangkan dalam rangka mengadakan unifikasi hukum tanah, maka pasal-pasal yang mengandung penerapan *Asas Accersie* (asas perlekatan) dianggap tidak berlaku lagi (GJ Aditjondro, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa sejak diundangkan UUPA, klaim atas *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* berdasarkan *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten tidak berlaku lagi (Munsyarief, 2013:15-20).

Pada masa sekarang, wacana *Rijksblad* Keraton dan *Rijksblad* Kadipaten muncul dengan gaya baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 2 Tahun 2017. Perdais No 2 tahun 2017 membahas tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap mengakui berlakunya *Rijksblad-Rijksblad* maupun peraturan-peraturan daerah lainnya. Selain itu, UUPA 1960 belum diberlakukan dengan baik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan status hukum hak atas Tanah Paku Alam (PAG) sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena secara yuridis, karena setelah dikeluarkannya Keppres RI Nomor 33 Tahun 1984 keistimewaan *Pakualaman Gorund* dibidang pertanahan belum mendapatkan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan. (Fahmi Isabrrin dan Suparmini, 2013 hal 74).

## 2. Klaim Tanah Paku Alam dan Kepemilikan Tanah

*Rijksblad* Keraton dan *Rijksblad* Kadipaten muncul dengan gaya baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 2 Tahun 2017. Perdais No 2 tahun 2017 membahas tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Salah satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena klaim Tanah Paku Alam yaitu wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo. Lahan pantai selatan Kulon Progo yang diklaim sebagai Tanah Paku Alam dalam sejarah sepanjang 22 km.

Menurut status tanah, kawasan pantai selatan tersebut terbagi menjadi dua. Kawasan pantai sebelah timur Sungai Progo ke arah Kabupaten Bantul merupakan milik kraton Yogyakarta (Sultan Ground), sedangkan kawasan pantai sebelah barat Sungai Progo ke arah Kutoarjo merupakan Tanah Paku Alam (*Pakualaman Ground*) (BPS Kabupaten Kulon Progo 2007).

Masyarakat sekitar mengetahui jika adanya Tanah Paku Alam sudah ada sejak dulu. Masyarakat pada zaman dulu merasakan ketidakpastian lahan pasir. Masyarakat yang mendiami gurun pasir ini mengerti bahwa lahan yang didiami adalah Tanah Paku Alam namun tidak mengetahui batas-batas wilayahnya (Eko Cahyono, 2010). Seiring waktu masyarakat mulai mengerti batas-batas Tanah Paku Alam. Di desa Bugel, Tanah Paku Alam berada ditengah-tengah lahan pemajekan warga, sedangkan di desa Garongan Tanah Paku Alam menjadi lapangan sepak bola (Eko Cahyono, 2010).

Menurut warga Desa Garongan dan Bugel, lahan pasir dibagi menjadi dua kategori, yakni tanah pemajekan dan tanah garapan. Tanah pemajekan adalah tanah yang bersertifikat dan wajib pajak, berada di sebelah dalam setelah tanah garapan dan dekat dengan rumah warga. Tanah garapan adalah lahan pasir yang berbatasan langsung dengan bibir pantai yang dulunya berupa bukit (gumuk) pasir yang kering dan tandus. Kini tanah garapan itu sudah dianggap milik mereka. Masyarakat menyebut ukuran luas lahan garapan dalam satuan kotakan yang luasnya rata-rata 2000-3000 m<sup>2</sup> (Eko Cahyono, 2010)

Jika menilik kembali di UUPA, salah satu poin didalamnya menyatakan memang betul bahwa tanah negara yang sudah dikelola oleh siapapun (petani) selama 10 tahun akan mendapatkan sertifikat tanah. Dikelola oleh penggarap (dalam hal ini petani) bisa diturunkan hak miliknya menjadi milik petani yang menggarap lahan tersebut, sesuai dengan yang tercantum di UUPA. Namun tanah yang sudah dikelola oleh petani lahan pantai selama lebih dari 30 tahun semenjak akan dibangunnya pabrik besi tersebut, klaim Tanah Paku Alam menguat.

Dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 terdapat aturan Tanah Magersari. Tanah Magersari adalah tanah yang tidak berlandaskan sertifikat, melainkan surat kekancingan dari pihak keraton sebagai penunjuk bahwa tanah itu adalah Tanah Kasultanan atau Tanah Paku Alam. Sehingga siapapun yang ingin menggunakan tanah dengan klaim Tanah Paku Alam harus memunyai ijin tanah magersari dari pihak Paku Alam.

Seiring berjalannya waktu penggunaan tanah magersari tidak terbatas hanya pada pendirian sarana dan prasarana publik. Tanah magersari mulai ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha dan pemodal-pemodal yang siap secara legal formal untuk menyewa tanah magersari, seperti PT JMI. PT JMI sudah mempunyai serat kekancingan dari pihak Paku Alam untuk pengoperasian pertambangan pabrik biji besi. Dan serat kekancingan menjadi alat yang kuat untuk menguasai lahan pesisir pantai khususnya Tanah Paku Alam.

Dari pihak masyarakat punya kepemilikan tanah yang sah menurut Negara. Sudah dibahas diatas bahwa tanah masyarakat terbagi menjadi dua yaitu tanah pemajekan dan tanah garapan. Tanah pemajekan sudah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik. Di desa Garongan bisa mengambil contoh Pak Widodo. Pak Widodo menyatakan :

“itu tanah punya saya, tanah sudah turun temurun dari simbah-simbah saya. tanah tersebut saya punya sertifikatnya”

Perkataan Pak Widodo tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah sah miliknya. Tanah pemajekan dan tanah garapan berada di bagian selatan (dari rumah Pak Widodo) atau kurang lebih 500 meter dari bibir pantai. Tanah Pak Widodo kurang lebih 1000 m<sup>2</sup>, sudah termasuk lahan pasir pantai. Karena memiliki sertifikat, maka Pak Widodo rutin membayar pajaknya. Seperti yang diungkapkan Pak Widodo yaitu :

“saya rutin untuk membayar pajak tanahnya”

Hal tersebut menunjukkan dari pihak pemerintah masih menerima pembayaran pajak dari tanah pemajekan Pak Widodo tersebut. Menurut

Soesangobeng, tanah pemajekan milik Pak Widodo adalah '*de jure*'. Tanah Pak Widodo mempunyai sertifikat hak milik yang artinya Pak Widodo pemilik terpenuh dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan keamanan kepemilikan oleh Negara. Begitupun dengan tanah garapan. Pak Widodo mengakuin bahwa tanah garapan pun mempunyai sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa tanah milik Pak Widodo berstatus "*de facto-de jure*". Hal tersebut menandakan bahwa tanah tersebut sah milik Pak Widodo dan klaim tanah yang melekat tersebut tidak berlaku atau seharusnya tidak terjadi.

Namun beda hal dengan tanah garapan. Tanah garapan adalah tanah yang digunakan masyarakat untuk pertanian. Lahan pesisir yang menjadi lahan pertanian bagi masyarakat adalah kawasan yang dianggap tak bertuan sejak jaman kemerdekaan ditandai dengan adanya bukti Letter X penduduk. Berdasarkan UUPA 1960 tanah tidak bertuan yang terlantar jika digarap (bertani) selama lebih dari 10 tahun, maka tanah tersebut dapat diberikan oleh penggarap (petani). Ditambah lagi didalam UUPA 1960 tanah kolonial dan Swapraja telah dihapuskan. Pihak Paku Alaman Yogyakarta sebagai yang mengklaim lahan di area tersebut dalam status tanah Swapraja yang menelantarkan tanah lebih dari 30 tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Pihak Paku Alaman Yogyakarta tidak berhak menguasai tanah di pesisir pantai.

Tanah garapan yang telah diakui oleh masyarakat dalam status kepemilikannya adalah kepemilikan anggapan nyata. Hal ini juga diperkuat oleh UUPA 1960 bahwa hukum Swapraja telah dihapuskan. Dengan begitu

Negara harusnya menjaga hak kepemilikan tanah milik Pak Widodo dan masyarakat lain baik tanah pemajekan maupun tanah garapan. Pemerintah DIY maupun Swapraja (Paku Alam) tidak berhak mengambil tanah Pak Widodo yang berstatus '*de facto-de jure*'.

Artinya dengan menunjukkan peta tersebut warga mengaskan bahwa wilayah PAG memang ada, tapi tidak seluas yang dibayangkan dan dituduhkan oleh pihak pemerintah daerah dan para pendukung proyek penambang pasir besi. Maka, dengan pemahaman hukum pertanahan dan agraria yang lambat laun warga miliki, dengan merujuk pada UUPA 1960 tentang tanah absente dan swapraja, mereka semakin berani menuntut hak untuk mengelola hak tanah tersebut. Dengan UUPA 1960, kemudian PAG termasuk Swapraja yang telah menelantarkan tanah selama 30 tahun, sehingga tanah tersebut boleh diambil oleh petani.

*Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Paku Alaman memang telah dihapuskan menurut UUPA. Namun sekarang muncul lagi dengan gaya baru yaitu Tanah Kasultanan dan Tanah Paku Alaman. Hal tersebut berdampak besar terhadap tata pertanahan di DIY. Salah satunya adalah klaim tanah di beberapa tempat contohnya pantai pesisir selatan Kulon Progo yang terkena klaim Tanah Pakualaman. Lahan tersebut adalah lahan anggota PPLP-KP bertanam. Maka dari itu, selain menolak pertambangan PPLP-KP juga menolak klaim tanah Paku Alam yang melekat pada lahannya. Hal tersebut dapat disampaikan bahwa PPLP-KP dapat dikategorikan sebagai gerakan reforma agraria.

## **Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Sebagai Gerakan Sosial**

Dalam poin ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai Paguyuban Petani Lahan Pantai sebagai gerakan sosial. Penulis akan mengidentifikasi bahwa gerakan yang diawali dengan kesamaan nasib akibat dampak dari sebuah pembangunan ini adalah termasuk ke dalam suatu gerakan sosial. Untuk memudahkan dalam penulisan, penulis akan melakukan identifikasi. Dalam mengidentifikasinya digunakan 4 indikator kepada Paguyuban Petani Lahan Pantai sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Paguyuban Petani Lahan Pantai dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial.

### **1. Tantangan Kolektif**

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Hal tersebut merupakan faktor utama bahwa gerakan sosial tersebut memiliki sumber daya yang kurang stabil seperti contoh secara struktural organisasi, dalam pendanaan maupun akses terhadap negara. Dalam konsisten menegaskan apa yang diperjuangkan, tantangan sumber daya tersebut harus bisa diatasi. Karena itu, gerakan menggunakan tantangan kolektif sebagai fokus utama bagi para anggota atau relawan, mendapat perhatian dari kubu lawan dari pihak-pihak lain akan apa yang diperjuangkan dapat tercapaikan.

Rencana pembangunan pabrik pasir besi sudah ada sejak tahun 2006. Namun pada tahun 2007, isu tentang akan dibangun pembangunan pabrik biji besi ini semakin nyata. Pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan pihak perusahaan PT JMI secara bergantian dengan berbagai cara mencoba untuk mensosialisasikan tentang rencana pembangunan pabrik

bijih besi selalu gagal. Sosialisasi tersebut selalu gagal dikarenakan dari pihak masyarakat setempat selalu mengagalkan acara tersebut. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan pabrik tersebut tidak menguntungkan.

Seperti yang dikatakan Pak Widodo :

“warga tidak tahu dan tidak mau tahu soal proyek tersebut, tidak menguntungkan buat kita kok”

Dalam pernyataan Pak Widodo tersebut, dapat diartikan bahwa masyarakat tidak menerima dan menolak adanya pembangunan pabrik biji tersebut. Maka segala cara dilakukan oleh masyarakat agar acara sosialisasi tersebut gagal. Seperti contoh di Desa Garongan seperti yang dikatakan oleh Pak Widodo:

“dari pihak pemerintah, pihak perusahaan dan antek-anteknya dulu sering ngadain sosialisasi-sosialisasi soal rencana pembangunan pabrik, gantian, tapi semua di gagal oleh masyarakat setempat. Dulu pernah diadain di kantor desa, pada ga berangkat semua. Dan pernah diadain lagi, pas mau mulai acaranya di demo besar-besaran sama masyarakat dan mereka bawa aparat kaya polisi tentara, terus akhirnya bentrok sama aparat.”

Pak Widodo juga mengatakan saat demonstran sering mendapatkan perlakuan represif dari aparat. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat untuk menolak acara tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk tidak menerima kedatangan mereka ke desa masing-masing. Tidak hanya Desa Garongan saja, namun sama halnya juga dengan desa-desa di empat kecamatan yang termasuk Paguyuban Petani Lahan Pantai yang lahanya menjadi rencana proyek pembangunan pabrik bijih besi tersebut.

Sebagai sebuah gerakan sosial yang terbentuk dilatar belakangi oleh penolakan akan dibangunnya pertambangan pasir besi. Sukirman sebagai salah satu petani lahan pantai merasa perlu dibentuknya wadah nonformal untuk mewadahi aspirasi-aspirasi para petani lahan pantai. Para petani lahan pantai dari daerah lain pun setuju dengan ide tersebut. Akhirnya terbentuklah Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo pada 31 Maret 2007. Yang diikuti oleh para petani lahan pantai yang berada di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, Kecamatan Temon dan Kecamatan Galur.

Dari hal tersebut, menyatakan bahwa tantangan kolektif sehingga terbentuknya Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah para petani sepakat untuk melakukan gerakan penolakan pembangunan pabrik biji besi untuk menyelamatkan lahan pasir pantai mereka yang apabila rencana pembangunan tersebut jadi, maka sumber mata pencaharian para petani akan hilang dan merusak lingkungan sekitar.

Sebagai gerakan yang terbentuk dilatar belakangi oleh akan hilangnya mata pencaharian. dalam perjalanannya juga menghadapi tantangan berupa kehilangan mata pencaharian yang merupakan dampak dari alih fungsi lahan pantai yang akan dijadikan areal pertambangan pasir besi. Kebanyakan dari anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai menggantungkan hidupnya dengan bertani. Sebagai contoh adalah Pak Widodo, seperti yang diungkapkannya pada penulis:

“ saya jadi petani itu dari sebelum lahir, artinya dari dulu dari mulai simbah-simbah saya, orang tua saya sampai saya itu cuma petani. Saya bisanya cuma bertani untuk hidup. Masyarakat sekitar juga rata-rata jadi petani”

Petani sudah menjadi identitas bagi masyarakat sekitar pesisir pantai. Bertani sudah menjadi warisan turun-temurun. Kesadaran bahwa mereka sama-sama petani membuat Paguyuban Petani Lahan Pantai semakin solid dan lantang untuk melakukan perlawanan. Lahan yang telah digarapnya selama lebih dari dua puluh tahun. Lahan pasir yang awalnya kering telah menjadi hamparan tanaman. Lahan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan belasan ribu petani di sepanjang pesisir pantai. Wilayah lahan pantai sudah sejak lama dikelola dengan baik oleh masyarakat pantai sebagai lahan pertanian. Petani di daerah pesisir pantai mengolah lahan pantau tersebut menjadi lahan pertanian sejak sebelum 2000. Setelah berbagai proyek pertanian tersebut mampu ditingkatkan produktivitasnya dan masyarakat khususnya yang berada di pesisir pantai ini banyak mengalami kemajuan. (Yunianto, 2019)



Gambar 1. Lahan Para Petani

Penolakan juga didasari akan dampaknya jika dibangunnya pertambangan pasir besi. Penolakan tersebut didasari atas keresahan sebagian masyarakat sekitar pesisir jika pembangunan pabrik biji besi

tersebut terlaksana maka akan membawa dampak serius bagi kerusakan ekosistem dan lingkungan setempat. Dampak terusan jika kerusakan ekosistem yaitu lahan persawahan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya. (Isabrin & Suparmini, 2013).



Gambar 2. Lahan Para Petani

Selain berlatar belakang akan hilangnya mata pencaharian dan kerusakan ekosistem, masih banyak ditemukan alasan lain untuk menguatkan perlawanan. Seiring berjalannya waktu, hambatan muncul dalam melakukan perlawanan oleh PPLP-KP yaitu klaim Tanah Paku Alam atau *Pakualaman Ground* atas status tanahnya. Klaim Tanah Paku Alam atas status tanahnya tertera pada Peraturan Daerah Istimewa No 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Kadipaten. Aturan yang berlaku pada tanah yang berstatus Tanah Paku Alam harus mempunyai *serat kekancingan* atau tanah magersari.

Tanah yang digunakan untuk bertanam adalah tanah sah milik para petani. Seperti yang dikatakan oleh Pak Widodo bahwa beliau mempunyai sertifikat tanah tersebut begitu juga anggota PPLP-KP lainnya. Dengan dikeluarkannya perdais tersebut, alasan PPLP-KP melakukan penolakan bertambah yaitu memperjuangkan tanahnya dengan menolak klaim Tanah Paku Alam atas tanahnya dan menolak magersari.

## **2. Tujuan Bersama**

Kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif PPLP. Dengan beberapa faktor tersebut, akhirnya para petani lahan pantai mempunyai inisiatif untuk melakukan sebuah pertemuan.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 diadakan acara sarasehan dan rapat akbar yang digelar di Balai Desa Karangwuni, Wates, Kulon Progo yang diketuai oleh Eko Yulianto. Rapat tersebut mengangkat topik “Perjuangan Rencana Rakyat Tani Menolak Penambangan Biji Besi” yang menghadirkan Agung Dwi Sutrisno yaitu Dosen Jurusan Teknik Perambangan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STT Nas) Yogyakarta dan Wirono Danabakti dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Rapat yang dimulai sejak jam 12.00 WIB tersebut telah dihadiri oleh ratusan petani lahan pantai dari beberapa daerah. Dalam rapat tersebut, menghasilkan bahwa disepakatinya penolakan rencana pembangunan pabrik pasir besi di pesisir Kulon progo. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana penolakan rencana penambangan pasir besi.

Individu-individu yang terlibat di dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai bukanlah dari kalangan akademisi maupun aktivis lingkungan dari LSM maupun komunitas. Individu yang terlibat dalam PPLP adalah para petani lahan pantai dan penduduk sekitar lahan pantai tersebut. Itu yang diungkapkan oleh Pak Widodo, sebagai berikut :

“Tidak hanya beberapa orang, semua masyarakat sini adalah anggota PPLP. Di PPLP tidak mau ada campur tangan orang lain. Supaya kita tetap utuh. Seperti contoh WTT (Wahana Tri Tunggal) WTT terbuka untuk bantuan dari LSM maupun semacamnya. Mereka jadi bubar karena terpecah dari anggota-anggotanya karena udah beda-beda kepentingannya”

Paguyuban Petani Lahan Pantai menetapkan slogan “Bertani atau mati, tolak tambang besi” . tujuan besar dari PPLP adalah menolak pembangunan pasir besi. Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa lahan pantai adalah sumber penghidupan bagi para petani dan menjaga ekosistem di pesisir pantai.

Dalam visi tersebut terkandung prinsip yang selalu diucapkan oleh PPLP-KP dalam perjuangannya yaitu prinsip “ Menanam adalah melawan”. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Widodo:

“dengan menanam kita telah melakukan perlawanan”

Maka dari itu, tantangan kolektif yang dihadapi oleh PPLP-KP yaitu mempertahankan mata pencahariaan, mempertahankan ekosistem lahan pantai agar tetap produktif serta mempertahankan hak atas tanah.

### **3. Solidaritas Dan Identitas Kolektif**

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang

kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata.

Permasalahan yang menjadi faktor Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah permasalahan mata pencaharian petani dan kerusakan lingkungan. Ketakutan akan kehilangan sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan menjadi faktor utama pemersatu bagi anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai. Dengan budaya yang dibangun di tubuh Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah dengan persaudaraannya yang kental. Seperti contoh anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai sering berkunjung ke rumah Pak Widodo walaupun hanya sekedar singgah sebentar dan bercakap dengan anggota lain. Rumah Pak Widodo bagaikan *basecamp* bagi anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai di Desa Garongan Kecamatan Panjatan. Berbagai aktivitas para anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai bisa dilakukan dirumahnya. Budaya semacam itulah yang mempererat gerakan Paguyuban Petani Lahan Pantai.

Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah organisasi yang unik karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Seperti kata pak Widodo :

“PPLP itu unik. Kita organisasi tidak ada struktur organisasinya. Jika ada ketua sekretaris dan bendahara itu Cuma simbolis dan pas ada perayaan aja”

Walaupun secara formalnya ada, seperti Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah Pak Supriyadi. Namun ketua maupun jabatan organisasi di tubuh Paguyuban Petani Lahan Pantai tidak memengaruhi apapun. Hanya simbol belaka. Kita sama-sama anggota PPLP-KP.

Atas dasar kepedulian lingkungan dan ancaman kehilangan mata pencaharian di lahan pantai bersama-sama masyarakat pesisir pantai bersepakat untuk membentuk sebuah kolektivitas aksi yang bertujuan untuk menolak rencana pembangunan pabrik biji besi dan melawan para antek-antek perusahaan.

Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa anggota yang terlibat dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai yang bergabung di dasari karena kesadaran yang timbul pada masing-masing individu.

Pada awal terbentuknya PPLP-KP gerakan digencarkan secara konsisten. Banyak strategi yang telah dilakukan, salah satunya adalah aksi. Aksi telah dilakukan di beberapa tempat. Pada tanggal 21 7 2008 melakukan aksi di UGM tepatnya di GSP menuntut UGM meminta maaf kepada masyarakat sosial soal keterlibatan dalam proyek tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 2008 PPLP pernah melakukan aksi di kantor DPRD Kulon Progo. Namun Kantor DPRD Kulon Progo kosong, pengunjuk rasa mengaku kecewa. Rombongan demonstrans tetap bertahan di Kantor DPRD sampai ada anggota dewan yang bersedia bertemu dan menanggapi tuntutan mereka.

Dalam hasil wawancara yang diambil di [www.kulonprogotolakambangbesi.wordpress.com](http://www.kulonprogotolakambangbesi.wordpress.com), Pak Widodo mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan adalah perlawanan rakyat, bukan PPLP maupun dari pihak manapun. Para petani pesisir merasa terancam hidupnya, maka mereka melakukan perlawanan. Mereka merasa dipaksa oleh perusahaan, maka mereka akan berontak. Para petani merasa

takut akan kehilangan mata pencahariannya yang telah memberikan sandang dan pangan, maka mereka berjuang habis-habisan. Dalam melakukan perjuangan perlawanan para petani sadar akan porsinya masing-masing. Seperti masyarakat yang berumur tua, yang berumur muda bahkan perempuan tahu menempatkan dirinya. Mereka melakukannya dengan penuh semangat dan menjadi ruh perjuangan. Maka apabila pihak perusahaan, pemerintah ataupun oknum-oknum lainnya masih mencoba menambang pasir pesisir maka akan dilawan oleh masyarakat karena bagi mereka pesisir sudah menjadi urat nadi orang cubung (penggambaran para petani di pesisir pantai selatan).

#### **4. Memelihara Politik Perlawanan**

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Ketiga indikator diatas yaitu tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu dalam gerakan memelihara politik perlawanan. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Sebelum terbentuknya Paguyuban Petani Lahan Pantai, gerakan penolakan yang dilakukan oleh Sukarman dan masyarakat lainnya dalam aksi penolakan terhadap pembangunan pabrik biji besi. Sudah diceritakan diatas, bahwa pada 2007 rencana pembangunan pabrik biji besi di Kulon Progo akan memanfaatkan wilayah lahan pasir pantai yang biasa digunakan petani pesisir untuk bertani. Padahal tanah tersebut secara legal adalah milik

para petani. Paguyuban Petani Lahan Pantai melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan dan pemerintah.

Dalam perjalanannya melakukan perlawanan, Paguyuban Petani Lahan Pantai menghadapi berbagai tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang dirugikan adalah kehadiran dari Paguyuban Petani Lahan Pantai itu sendiri, sehingga pihak-pihak tersebut menganggap rival mereka. Pihak Paguyuban Petani Lahan Pantai sendiri tetap konsisten menantang adanya pembangunan pabrik biji besi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Widodo :

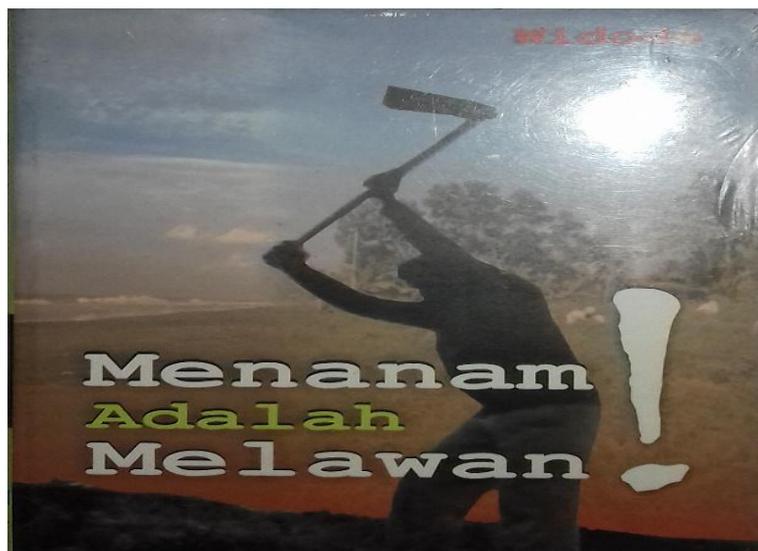
“mereka mau sosialisasi atau mau apalah, kita tetap menolak, kita akan tetap menanam, *wong* itu tanah kita kok”

Dengan semangat dan keyakinan yang dibangun oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai “menanam adalah melawan” inilah yang membuat bertahannya para masyarakat untuk menolak pembangunan pabrik beiji besi.

Kemudian beberapa hal yang menjadi faktor penguat dan memperkuat gerakan serta menjadi tekad masyarakat yaitu kesadaran akan keberlangsungan hidup dan keyakinan akan batalnya pembangunan pabrik biji besi. Pak Widodo mengatakan:

“kita tetap konsisten mempertahankan tanah kita. Palingan dari pihak perusahaan sudah capek nanggung kita, ngelawan kok terus ga ada capeknya, trus akhirnya pabrik mandek gitu aja.”

Semangat inilah yang kini terus terjaga hingga sekarang tetap konsisten dalam memperjuangkan tanah-tanah tersebut. Mempertahankan dengan budaya seperti Istighosah dan sholawat yang dilakukan setiap bulan Syawal. Merayakan hari lahirnya Paguyuban Petani Lahan Pantai pada tanggal 1 April sebagai pemersatu antar anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai.



Gambar 3. Buku Menanam Adalah Melawan  
Sumber : Internet

Semboyan yang sebagai penyemangat itu dibuatkan buku dengan judul yang sama, “menanam adalah melawan” yang merupakan sebuah catatan harian seorang pesisir Kulon Progo, Pak Widodo. Buku itu ditulis langsung oleh Pak Widodo. Diterbitkan oleh PPLP-KP dan Tanah Air Beta pada tahun 2013. Buku itu diawali dengan sebuah kata-kata yaitu “Kalau petani sudah berhenti menanam, buat apa menolak tambang. Karena perlawanan sesungguhnya berada di lahan”-anonim. Kata-kata yang membuat para petani masih melakukan perlawanan. Dalam buku tersebut juga menjelaskan kegiatan para petani. Bagi petani lahan pantai, menanam bukan hanya sekedar pekerjaan namun sebuah aksi perlawanan. Ditengah perjuangan perlawanan petani pasir besi, semboyan “menanam adalah melawan” bersatu dengan apa yang telah menjadi ciri khas perjuangan mereka yaitu semangat kemandirian. Buku tersebut adalah narasi sekaligus semangat kemandirian.

Semangat kemandirian terkandung dalam cerita-cerita tersebut sebagai pilihan bentuk perlawanan yang ditempuh sebagai strategi gerakan yang diambil oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai. Hal tersebut menyebutkan bahwa bukan berarti Paguyuban Petani Lahan Pantai untuk menolak solidaritas. Soidaritas yang dimaksud oleh PPLP-KP adalah orang (dari pihak lain) yang ikut membantu perjuangan PPLP-KP. Solidaritas biasanya datang dari pihak luar, seperti contoh LSM, ormas ataupun bentuk lainnya. Solidaritas adalah sebutan bagi orang-orang yang mendukung gerakan perlawanan PPLP-KP. Terdapat kalimat "bahkan semakin banyak orang yang bersolidaritas itu sangat kami harapkan". Kalimat tersebut merupakan penegasan sikap selektif untuk para solidaritas dan kehati-hatian terhadap pihak luar yang mempunyai kepentingan di Paguyuban Petani Lahan Pantai. Dengan semangat kemandiriannya itu, maka pihak Paguyuban Petani Lahan Pantai membuat surat pernyataan yang berisi :



Gambar 4. Surat Pernyataan Dari PPLP-KP Untuk Para Solidaritas

Surat pernyataan resmi yang dibuat oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai telah menjelaskan bahwa sebuah bentuk solidaritas akan diterima,

namun jika terjadi sesuatu hal maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak yang bersolidaritas. Bentuk solidaritas cukup beragam dari para solidaritas. Pada hari Jumat, 15 Maret 2019 para solidaritas menunjukan aksi solidaritasnya dalam rangka menuju harlah PPLP\_KP yang ke-13 dengan judul “Lagu Cinta Untuk Petani”. Pak Widodo selaku perwakilan dari Paguyuban Petani Lahan Pantai datang dan memberi sambutan yaitu :

“saya sebagai perwakilan dari PPLP merasa bangga dan terimakasih kepada para solidaritas, karena dalam menyambut harlah PPLP yang ke-13 ini dibuatkan acara beginian”

Kalimat yang diucapkan Pak Widodo tersebut menandakan bahwa bentuk dukungan dari pihak luar (solidaritas) sangat dibutuhkan dan juga di apresiasi agar PPLP-KP dan pihak lain berjuang dengan sendiri-sendiri. Namun untuk menjaga politik perlawanan, pihak Paguyuban Petani Lahan Pantai tetap menganut semangat kemandirian agar terhindar dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sempit.

Berdasarkan hasil analisis penulis berdasarkan 4 indikator gerakan sosial dari Sidney Tarrow yaitu tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif dan memelihara politik perlawanan (Suharko, 2006). PPLP-KP bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial karena memiliki 4 property dasar tersebut. Tantangan kolektif bagi PPLP-KP adalah hilangnya mata pencaharian para petani, kerusakan ekosistem dan perampasan tanah. Tujuan bersama PPLP-KP adalah mempertahankan mata pencaharian dan tanah, dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Solidaritas dan identitas Kolektif adalah kesadaran akan kehilangan sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. Dan memelihara politik perlawanan adalah PPLP-

KP yang berjuang secara mandiri tanpa campur tangan lembaga maupun organisasi manapun. Lalu “ Menanam adalah Melawan” menjadi penyemangat tersendiri untuk para petani PPLP-KP.

Alasan-alasan tersebut selaras dengan penjelasan tentang gerakan sosial pada periode ini terutama diarahkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” muncul gerakan sosial dan faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melibatkan di dalam gerakan sosial (Sadikin, 2005) Hal tersebut berkaitan dengan perspektif Marxis dalam memandang masyarakat tidak bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi yang konfliktual, yakni pertentangan kelas proletar lawan borjuis. Kemunculan gerakan sosial bukan disebabkan adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Gerakan sosial adalah perjuangan kelas yang lahir karena adanya kesadaran kelas.

Perjuangan perlawanan PPLP-KP mengalami dinamika yang cukup signifikan. Melakukan perlawanan memuncak pada tahun 2011 saat Pak Tukijo ditangkap (LBH Yogyakarta, 2011). Pak Tukijo adalah anggota PPLP-KP yang diculik secara terencana oleh Polisi pada Minggu 1 Mei 2011 Pukul 11.00 WIB. (Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, 2011) Pak Tukijo dituduh telah melakukan penyanderaan terhadap 7 karyawan PT JMI. Padahal yang dilakukan Pak Tukijo pada saat itu hanya memperingatkan dan menasehati karyawan tersebut untuk tidak melewati jalan yang telah disepakati (Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, 2011).

Resistensi petani terhadap rencana kelahiran industri tambang yang dimulai sejak tahun 2006 dengan alasan akan mengancam terhadap penghasilan masyarakat kini mulai pecah (Suliadi, 2015). Pada tahun 2013 sebagian anggota PPLP-KP seperti masyarakat Desa Karangwuni mulai berbalik arah menjadi menerima adanya penambangan pasir besi. Dalam sebuah hasil wawancara yang diambil dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/11/09/penolak-pasir-besi-di-karangwuni-kulonprogo-kini-berubah-pikiran>. Salah satu masyarakat Desa Karangwuni dusun III yang juga anggota PPLP-KP yaitu Subandi mengungkapkan :

“kami sudah rembugan dan kemudian sepakat untuk menerimanya. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa program pemerintah melalui proyek ini sebenarnya bagus”

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Karangwuni sudah menerima jika tanahnya dijadikan penambangan pasir. Sikap mendukung oleh masyarakat Desa Karangwuni ada dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah sanksi sosial. Pak Subandi mengatakan :

“yang jelas, kami sudah capek untuk menolak tim mereka (JMI) dan juga ini lama-lama bisa memunculkan masalah sosial. Karena, yang ngga setuju sekarang malah dikucilkan. Sanksi sosial seperti ini yang saya ngga kuat”

Perlakuan dikucilkan dari masyarakat lain adalah alasan terkuat bagi masyarakat Desa Karangwuni untuk menerima proyek tersebut. Tidak hanya sanksi sosial yang menjadi alasan untuk menerima penambangan, klaim Tanah Paku Alam pun menjadi pertimbangan. Status lahan pantai yang menjadi tanah garapan para petani menurut pemerintah Yogyakarta adalah Tanah Paku Alam. Walaupun dari beberapa pihak mempertanyakan akan klaim tersebut, namun

hal tersebut menjadi alasan kenapa masyarakat menjadi menerima akan kehadiran penambangan.

Akhirnya dengan keputusan tersebut, 240 warga Desa Karangwuni telah mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati yaitu antara seharga 75 ribu. Mereka telah menerima uang muka ganti rugi masing-masing Rp 10 juta usai negosiasi. Ganti rugi diangsur menjadi beberapa tahap dan pada akhir tahun 2013, masyarakat Desa Karangwuni telah mendapatkan ganti rugi tahap V. Sekarang masyarakat Desa Karangwuni hanya mengandalkan tanah Tegalan untuk bercocok tanam. Namun tak semua warga Desa Karangwuni menerima pertambangan tersebut. Warga petani dukuh V Desa Karangwuni masih aktif untuk melakukan penolakan. Seperti yang dilansir pada <http://www.tribunnews.com/regional/2013/08/02/paguyuban-petani-lahan-pasir-kulonprogo-tolak-penambangan-pasir-besi>, Pak Suparno sebagai perwakilan Dukuh V Desa Karangwuni mengatakan bahwa hingga kini warga pesisir masih solid untuk menolak, walaupun sebagian dari warga Desa Karangwuni sudah menerima datangnya pertambangan.

Perjuangan yang dilakukan oleh Pak Suparno sebagai anggota PPLP-KP dan tiga teman petaninya di Desa Karangwuni masih mengalami kecaman. Dari mula kepala Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dan Lurah Desa Karangwuni datang untuk memberitahu bahwa tanah yang ditinggali adalah Tanah Pakualaman. Namun Pak Suparno tetap konsisten tidak mengakui klaim tersebut. Terkait sikap dari Pak Suparno tersebut, akhirnya Pak Suparno mendapat somasi dari pihak Pakualaman agar melepaskan tanah yang dimiliki Pak Suparno dan mengambil kompensasi (Muhammad Afandi, 2016).

Jika sebagian masyarakat Desa Karangwuni berbalik arah menjadi menerima penambangan, di Desa Bugel terdapat kondisi interaksi masyarakat yang buruk antara yang pro dan kontra akan penambangan. Masyarakat Desa Bugel terbagi dua menjadi yang pro dan yang kontra bisa disebut sebagai anggota PPLP-KP. Kondisi interaksi masyarakat Di Desa Bugel menjadi renggang dan tercipta jarak yang jauh sehingga menciptakan masyarakat yang tidak dinamis. (Titis Bintoro, 2016).

Pada tahun 2018, PT JMI tidak ada aktivitas produksi siteplan pabrik pengolahan pasir besi oleh PT JMI di Desa Karangwuni. Berdasarkan info yang diambil dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/09/tal-ada-aktivitas-produksi-di-siteplan-pabrik-pengolahan-pasir-besi-jmi-di-karangwuni>, Pihak PT JMI memberikan izin untuk petani Desa Karangwuni menggarap kembali lahan pasir yang sudah dibebaskan untuk kegiatan penambangan tersebut.

Walaupun banyak dari anggota PPLP-KP yang dulunya ikut bersama-sama menolak penambangan namun telah berbalik arah menjadi pendukung, PPLP-KP tetap beridiri kokoh. PPLP-KP tetap konsisten untuk selalu melakukan penolakan terhadap penambangan dengan dinamika didalamnya. Konsisten yang selalu dipegang membuat PPLP-KP berumur panjang hingga saat ini sudah mencapai umur ke-13 tahun. Hal itu membuktikan bahwa PPLP-KP selalu solid dan eksis hingga sekarang.

### **Repertoar Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo**

Pada bagian ini, penulis akan menarasikan bentuk perlawanan yang digunakan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai terhadap pertambangan pasir besi di lahan pesisir pantai Kulon Progo. Dalam mengkaji perlawanan PPLP-

KP penulis menggunakan teori repertoar perlawanan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial pada signifikasi pilihan bentuk strategi dan taktik aksi kolektif.

Perlawanan terhadap rencana pembangunan pabrik biji besi di lahan pesisir pantai Kulon Progo ini dimulai pada tahun 2007 dan perlawanan yang dilakukan masih ada hingga sekarang. Penulis akan mengambil rentan 2 tahun perlawanan yaitu pada tahun 2016 sampai 2018. Penulis akan menarasikan berbagai bentuk perlawanan yang terjadi.

Dengan kata lain, penulis akan mencoba menarasikan apa saja yang telah dilakukan PPLP-KP terhadap pembangunan pabrik biji besi di Kulon Progo. Untuk mempermudah dalam mengkaji repertoar perlawanan tersebut penulis menggunakan beberapa indikator dimana dalam setiap gerakan perlawanan tersebut akan sekaligus berkaitan. Indikator tersebut antara lain : kontentasi, identitas perlawanan, intentitas perlawanan dan klaim.

Kontentasi adalah pertentangan yang terjadi antara pihak PPLP-KP dengan pihak PT JMI. Kemudian identitas perlawanan adalah identitas yang digunakan oleh PPLP-KP ketika melakukan perlawanan yang dilakukan. Yang terakhir adalah klaim yaitu merupakan tujuan bersama dari perlawanan tersebut.

### **1. Alasan Penolakan Terhadap Pembangunan Pabrik Biji Besi**

Isu akan dibangunnya pabrik biji besi sudah ada 2006. Pada tahun 2007 pertambangan tersebut akan dioperasikan. Kontrak karya PT JMI dengan pemerintah yaitu selama 30 tahun terhitung sejak tahun 2007. PT JMI akan menambang pasir pesisir pantai selatan untuk dijadikan biji besi.

Rencana proyek penambangan pasir besi tersebut akan sampai kedalaman 14,5 meter, dengan bentang sepanjang 22 kilometer serta lebar 1,8 kilometer. Pembangunan akan mengenai lahan pasir yang digunakan bertani oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pesisir pantai rata-rata bekerja sebagai petani. Para petani sudah bertani kurang lebih selama 20 tahun. Seperti yang diungkapkan pak Widodo :

“saya dari kecil sudah jadi petani, bapak ibu saya juga petani, warga sekitar juga rata-rata petani”

Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka mata pencaharian masyarakat sekitar akan terancam hilang. Identitas yang melekat pada masyarakat sekitar adalah petani. Masyarakat sekitar hanya menyadari bahwa dirinya hanya bisa bekerja sebagai petani. Jika wilayah tersebut diahlikan menjadi area pertambangan, para petani tersebut tidak akan mempunyai penghasilan. Menggantikan wilayah yang biasanya untuk bertani menjadi area pertambangan akan merampas hidup mereka.

Ditambah lagi apabila pertambangan besi dibangun akan membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan. Keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan kerusakan tanah, serta dirasa tidak menghargai jerih payah petani yang mampu mengolah tanah tandus sehingga menjadi dapat ditanami. Lahan persawahan area pertambangan akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya. Pemerintah Daerah dan PT JMM berdalih bahwa 90% penggunaan tanah yang akan ditambang, merupakan tanah milik *Pakualaman Ground*.

Maka dari itu timbullah penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan pun didasarkan atas bahwa

pertambangan akan menghilangkan mata pencaharian mereka dan akan merusak lingkungan. Itulah beberapa alasan mengapa petani lahan pantai atau yang tergabung Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo menyatakan penolakan terhadap pertambangan.

## **2. Bentuk-bentuk Perlawanan PPLP-KP**

Penolakan terhadap pembangunan pabrik biji besi yang akan dilakukan oleh PT JMI akan melakukan eksploitasi selama 30 tahun. Perlawanan sangat digencarkan pada tahun 2008 hingga 2012. Padahal PPLP-KP organisasi tidak terstruktur namun pergerakan perlawanan dilaksanakan secara matang dan terarah.

### **a. Kontentasi**

Dalam bagian ini, penulis akan menarasikan berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo terhadap PT JMI. Unikny PPLP-KP adalah organisasinya yang tidak memikirkan kedepan, tak ada strategi kedepannya. Berikut bentuk perlawanan PPLP-KP selama dua tahun terakhir.

#### **1) Menanam, Merawat, Memanen.**

Menanam, merawat, memanem. Tiga kata tersebut selalu dikatakan oleh anggota PPLP-KP sebagai bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan ini telah dilakukan semenjak kurangnya aktivitas PT JMI di pesisir pantai Kulon Progo. Setelahnya pihak PT JMI tidak lagi

melakukan aktivitasnya, strategi menanam, merawat dan memanen adalah bentuk perlawanan paling utama.

Yang ditanam oleh para petani lahan pasir cukup beragam. Ada buah-buahan hingga sayur-sayuran. Hasil tanaman tersebut nantinya akan disetorkan di berbagai pasar di Jogja. Pak Widodo mengatakan :

“hasil tanaman ini ini mbak (menunjuk : terong, semangka, kol) nantinya akan disetor ke pasar-pasar di Jogja. Coba kalo tanahnya di tambang trus ga ada ini semua, mau makan apa mereka”

Dari hasil ungkapan Pak Widodo menyiratkan kekesalan kalau tanahnya dialih fungsikan. Maka pasokan buah-buahan dan sayur-sayuran akan berkurang.

Bagi PPLP-KP menanam adalah melawan. Pak Widodo mengatakan:

“perlawanan yang dilakukan pplp saat ini ya cuma menanam, menanam ya melawan, itu aja. Pasti mbak mikirnya ada strategi perlawanan untuk kedepan gini-gini ya enggak ada. Kita organisasi santai mbak. Yang dilakukan ya menanam, menanam, menanam udah”

Pada tanggal 15 Maret 2019, pada saat acara Menuju Harlah PPLP-KP yang ke-13. Pak Widodo menyampaikan :

“yang bisa kita lakukan sehari-hari hanyalah menanam, merawat, memanen. Itulah bentuk perjuangan yang masih kita lakukan”

Dari perkataan Pak Widodo tersebut bisa ditarik kesimpulan adalah gerakan perlawanan yang masih dilakukan adalah menanam seperti biasanya. PPLP-KP tidak mempunyai strategi khusus untuk jangka panjang. Walaupun para petani bisa bertani lagi, tidak

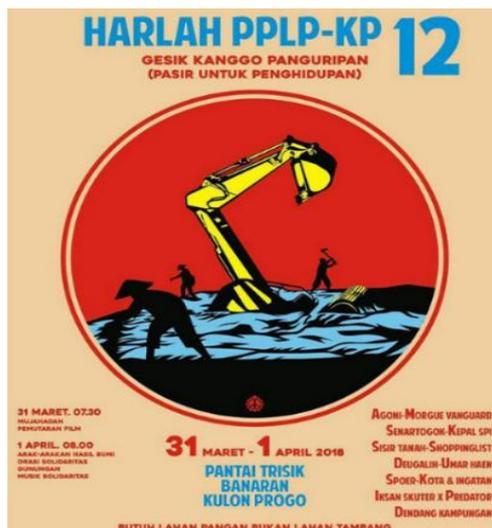
dipungkiri masih ada rasa was-was. Hal tersebut diakibatkan oleh PT JMI dapat beropersi lagi mengingat kontrak karya masih berlaku dan mencoba merampas lagi tanah mereka. Apalagi sekarang diperkuat dengan adanya dalil Tanah Paku Alam pada tanah mereka.

## 2) Merayakan Hari Lahir PPLP-KP (Harlah)

Salah satu kegiatan perlawanan yang masih dilakukan oleh PPLP-KP adalah merayakan hari lahirnya PPLP-KP itu sendiri. Berkisar pada tanggal 30-31 Maret dan 1-2 April selalu diadakan pesta perayaan untuk merayakan hari lahir di tempat yang berbeda. Banyak kegiatan yang diselenggarakan seperti pawai motor, dangdutan, panggung aspirasi bersama solidaritas, menggotong *gunungan* (hasil panen yang disusun berbentuk kerucut) hingga shalawatan dan pengajian.



Gambar 5. Poster Hari Lahir PPLP-KP ke 11



Gambar 6. Poster Hari Lahir PPLP-KP ke 12

Pada tanggal 30-31 Maret 2019, PPLP-KP merayakan hari lahir yang ke-13 di desa Karangsewu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut telah disebarluaskan dalam bentuk poster yang disebar dimedia sosial oleh para solidaritas dan akun-akun perjuangan.



Gambar 7. Poster Hari Lahir PPLP-KP ke 13

Isi dari kegiatan hari lahir tersebut antara lain pada tanggal 30 Maret 2019 yaitu mujahadah dan pemutaran video perjuangan dari PPLP-KP. Pada tanggal 31 Maret 2019 perayaan hari lahir juga diisi beberapa kegiatan. Yang pertama dimulai dari konvoi membawa

gunungan (hasil panen yang disusun kerucut) mengitari daerah sekitar oleh anggota PPLP-KP. Setelah selesai kegiatan berpusat pada panggung yang telah tersedia. Acara dipandu oleh Mas Dodok dari “Jogja Ora Didol”. Beberapa anggota PPLP melakukan orasi perjuangan dengan bergantian acara pentas musik dari para solidaritas. Akhir acara musik dangdut.



Gambar 8. Gunungan Perayaan Hari Lahir PPLP-KP ke 13



Gambar 9. Panggung Perayaan Hari Lahir PPLP-KP ke 13

Tadi adalah serangkaian acara yang diselenggarakan di hari lahir PPLP yang ke-13. Acara harlah tersebut juga didatangi oleh para

solidaritas dari berbagai lapisan. Dari mulai musisi kritis jogja hingga mahasiswa ikut mendukung acara tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan perjuangannya, PPLP-KP tidak sendirian dan banyak yang membantu perjuangannya.

Sebelum hari lahir PPLP-KP, para solidaritas mengadakan acara musik untuk PPLP-KP. Acara tersebut bernama “Lagu Cinta Untuk Petani : Menuju Harlah Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo ke 13” yang diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 di Rumah IVAA yang dimeriahkan oleh musisi-musisi kritis Jogja. Acara tersebut sebagai acara untuk ikut merayakan perayaan hari lahir PPLP-KP yang ke-13. Selain panggung musik, terdapat juga acara donasi min Rp 10.000,00 yang akan disalurkan ke PPLP-KP Acara tersebut juga dihadiri oleh Pak Widodo dan beberapa anggota PPLP-KP sebagai perwakilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para solidaritas masih setia ikut berjuang bersama PPLP-KP dalam menolak pertambangan.



Gambar 10. Poster Lagu Cinta Untuk Petani

Pak Widodo mengatakan bahwa merayakan hari lahir PPLP setiap tahun juga termasuk sebagai salah satu bentuk perjuangan yang masih konsisten dilakukan. Seperti yang diungkapkan Pak Widodo :

“yang kita lakukan ya Cuma kaya merayakan harlah PPLP, tahun ini diadakan akhir bulan Maret di Desa Karangsewu Galur sana. Nanti ada mujahadah sama besok konvoi gunungan.”

Dengan konsistennya diadakan acara tersebut, menunjukkan bahwa PPLP-KP masih menunjukkan eksistensinya. PPLP-KP berharap acara tersebut masih bisa dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Untuk tetap melakukan strategi-strategi membutuhkan sumber pendanaan yang stabil. PPLP-KP memperoleh sumber dana dari tiga cara yaitu iuran, hasil usaha pertanian dan usaha dari PPLP-KP (Aziz Setyawan, dkk, 2015). Pertama yaitu melalui iuran sukarela dari anggota PPLP-KP. Iuran langsung saat diadakan pertemuan atau rapat tertutup. Yang kedua adalah usaha dari hasil pertanian. Yang terakhir adalah usaha yang dilakukan oleh PPLP-KP seperti usaha sablon kaos saat perayaan hari lahir. Selain tiga cara tersebut, terdapat juga saluran dana dari para solidaritas. Seperti para solidaritas yang mengadakan panggung musik dan mengadakan donasi. Donasi yang terkumpul akan diberikan ke PPLP-KP untuk dikelola sendiri.

Namun untuk acara harlah tahun 2019, iuran tidak hanya dari pihak PPLP-KP, namun juga dari pihak solidaritas. Pak Widodo mengatakan :

“kalo acara yang kemarin kita cuma iuran buat panggungnya saja, kaya panggung, sound system itu kita yang tanggung.

Sama kalo konsumsinya langsung dari warga sana. Per KK ngasih empat snack seharga 10 ribu rupiah. Itupun dana juga dapet dari solidaritas. Mereka ngasih uang juga tampil di acara. Yang kemarin daftar buat manggung itu sampe 26, kita seleksi lagi”

PPLP-KP masih eksis dikalangan para solidaritas. Terbukti dengan minatnya para pemusik Jogja yang ingin tampil di acara harlah kemarin. Dan tak hanya itu, para solidaritas dari berbagai lapisan turut hadir ke acara tersebut bahkan sampai diluar target yang direncanakan oleh PPLP-KP.

### 3) Melakukan Kegiatan Keagamaan

Selain mengadakan perayaan hari lahir, PPLP-KP juga mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut seperti Syawalan, Tahlilan, Mujahadah, Sholawatan, istighosah dan lain-lainnya. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut secara berpindah-pindah seperti halnya dalam perayaan hari lahir.

Acara yang wajib diselenggarakan yaitu Syawalan. Syawalan yang berisikan halal bihalal dan saling memaafkan adalah kewajiban setiap umat beragama. Setiap bulan Syawal, PPLP mengadakan acara Syawalan untuk berkumpul bersama dan bermaaf-maafan sesama anggota PPLP, para solidaritas, dan warga yang masih berjuang melawan pengusuran oleh PT JMI dan Pemerintah.

Lalu ada acara Tahlilan yang dilakukan secara rutin oleh PPLP-KP. Ada juga acara Sholawatan dan Istighosah.. Untuk menjaga semangat perjuangan, yang akan menjadi pengisi acara khususnya istigosah juga dilakukan seleksi. Acara tersebut mengundang ustad

sebagai pengisi acara. PPLP-KP melakukan seleksi untuk ustad yang akan mengisi istighosah. Diseleksi dulu apakah ustad tersebut pro atau kontra oleh tambang Mas Adi seorang relawan mengatakan :

“PPLP itu unik. Kalau bikin acara seperti sholawatan atau istighosah, mereka juga selektif. Selektif juga memilih ustadnya. Dicari yang kontra dengan tambang. Kalo dapat ustad yang pro tambang, diusir ustadnya”

Acara seperti solawatan, tahlilan, istighosah diselenggarakan bertujuan untuk selalu merekatkan dan menjaga solidaritas antara anggota PPLP-KP dan warga. Agar selalu kompak dan konsisten dalam melakukan perlawanan.

#### 4) Bersolidaritas

Selain menanam, merayakan hari lahir dan mengadakan acara keagamaan, PPLP juga sering bersolidaritas. Bersolidaritas yang dimaksud adalah ikut mendukung gerakan-gerakan perlawanan lainnya. Seperti contoh ikut berjuang menolak pembangunan bandara YIA di Temon Kulon Progo dan bersolidaritas di Paguyuban Warga Penolakan Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Tidak hanya sebatas menolak persoalan pertambangan, seperti yang diungkapkan Mas Adi :

“PPLP juga ikut bersolidaritas pada hal-hal lain, tak menentu soal pertambangan, seperti contoh anti korupsi dan kasus-kasus yang lainnya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa PPLP-KP tidak hanya fokus berjuang menolak tambang di pesisir pantai, tapi juga ikut membantu dalam bentuk perjuangan yang lain. Dengan ikut serta bersolidaritas di

berbagai kasus yang membuat PPLP-KP dikenal luas oleh masyarakat. Untuk pendanaan bersolidaritas, Pak Widodo mengaku bahwa sebagian menggunakan uang pribadi semisal untuk makan dan kebutuhan lainnya. Seperti yang diungkapkan Pak Widodo :

“kalo ada acara yang ngundang PPLP ya saya yang datang karena saya sebagai humas eksternalnya. Biasanya PPLP hanya kasih saya tiket saja, selebihnya ya saya pake uang sendiri dan juga ijin istri saya”

Mas Adi selaku solidaritas PPLP-KP mengapresiasi atas tindakan bersolidaritas tersebut.

“yang saya suka dari PPLP-KP ya itu, dia sedang berjuang tapi juga ikut berjuang bersama lainnya. Kalau secara personal saya suka dengan kepribadian Pak Widodo, peduli dengan apa yang dia anggap benar.”

Bersolidaritas bisa dijadikan bentuk sebagai gerakan perlawanan PPLP-KP yang masih dilakukan. Dengan terus bersolidaritas maka tali persaudaraan tidak akan terputus. Tali perjuangan akan terus dijaga agar keadilan dapat ditegakan.

#### **b. Identitas Perlawanan**

Dalam membangun perlawanan terhadap pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan, identitas perlawanan merupakan sesuatu yang menentukan sejauh mana perlawanan merupakan sesuatu yang menentukan sejauh mana perlawanan itu dapat dimobilisasi. Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata.

Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakannya memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu.

Dalam acara yang dibuat para solidaritas yaitu “Lagu Cinta Untuk Petani : Menuju Harlah Paguyuban Petani laan Pantai Kulon Progo Ke 13” yang diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Pak Widodo datang sebagai perwakilan dari PPLP-KP. Pak Widodo berkesempatan mengatakan sepatah duakata. Pak Widodo menyampaikan :

“kita berusaha memberikan lingkungan yang baik”

Berangkat dari ucapan Pak Widodo pada acara tersebut, terdapat harapan besar dalam melakukan perjuangan perlawanan. Para anggota PPLP-KP berusaha menjaga lingkungan yang sudah baik dari tangan siapapun (investor = PT JMI) untuk di kehidupan selanjutnya lingkungannya akan tetap baik. Gerakan perlawanan terhadap pertambangan pasir besi di Kulon Progo menjadi sangat massif dan berkelanjutan.

Selain itu, simbol yang melekat pada PPLP-KP adalah petani. Gaya perlawanan sebagai petani sangat efektif dalam mempertahankan gerakan perlawanan. Menurut PPLP-KP, menanam adalah strategi paling sesuai dengan identitasnya. Dengan terus menanam dan menanam, sama saja dengan menjaga tanahnya agar tidak direbut oleh investor.

### **c. Insentitas Perlawanan**

Perlawanan terhadap pertambangan pasir besi ini dimulai pada tahun 2007. Pada awal terbentuknya PPLP-KP, beberapa bentuk perlawanan telah dipilih untuk menolak pertambangan ini. Perlawanan

yang dilakukan oleh PPLP-KP ini berjalan hampir selama 13 tahun. Dari dimulai adanya rencana sosialisasi-sosialisasi dari pihak PT JMI dan Pemerintah hingga sekarang.

Insentitas perlawanan dalam bentuk menanam merupakan perlawanan yang intensitas perlawanannya rutin. Dari awal strategi perlawanan, menanam selalu dilakukan namun ada bentuk perlawanan lain seperti demo dan diadakannya panggung sastra.

#### **d. Klaim**

Dalam gerakan perlawanannya, PPLP-KP terhadap pembangunan pabrik biji besi melibatkan dua unsur klaim diatas, yaitu klaim identitas dan klaim program. Dalam klaim identitas, dimana adanya keinginan keterlibatan suatu pihak tertentu dalam sebagai pengakuan terhadap eksistensi mereka. Penolakan dalam bentuk menanam, merawat dan memanen yang bertujuan untuk membuktikan bahwa lahan pesisir pantai milik para petani akan lebih sejahtera dibandingkan lahan pesisir pantai ditambang.

Keterlibatan petani dalam agenda-agenda yang telah disepakati menjadi sebuah klaim yang termasuk dalam gerakan perlawanan. Ketika pembangunan pabrik biji besi pada tahun 2007, masyarakat menganggap bahwa ada pembangunan tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat malah sebaliknya. Kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan mengancam di depan mata.

Klaim program yang terdapat dalam gerakan perlawanan tambang ini adalah adanya tuntutan untuk membatalkan pembangunan pabrik biji

besi oleh PT JMI di Kulon Progo. Bentuk-bentuk perlawanan yang dipilih adalah merupakan bentuk perlawanan yang menuntut untuk diusirnya PT JMI dari pesisir pantai Kulon Progo..

### **Politik Keseharian Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (*Daily Politics*)**

Keterbatasan dalam sistem politik perwakilan menjelaskan pula telah menjauhkan warga negara dari isu-isu formal. Ide awal demokrasi ini yakni pengaturan institusional bagi partisipasi warganegara, ironisnya dalam perkembangannya justru melakukan pembatasan bagi proses partisipasi itu sendiri. Secara inheren gagasan ini memiliki kontradiksi di dalam dirinya sendiri.

Banyak suara-suara rakyat yang tak terdengar atau mungkin memang tidak didengar. Hal tersebut yang membuat proses demokrasi menimbulkan meroketnya apatisisme rakyat. Fenomena politik ini merujuk pada kompleksitas dan praktek politik yang berlangsung (tapi tersembunyi) di belakang dinding lembaga-lembaga politik yang bersifat formal dan tetap.

#### **1. Isu Politik**

Dikeluarkan Perdais No 2 Tahun 2017 tentang munculnya kembali Sultan Ground dan Pakualaman Ground cukup mengejutnya. Hal tersebut juga berdampak dengan PPLP-KP. Dalam Perdais No 2 Tahun 2017 pasal 26 ayat 4 menyebutkan bahwa lahan pesisir pantai yang digunakan petani untuk bertanam termasuk klaim Pakualaman Ground. Sehingga menuai respon dari PPLP-KP.

Politik keseharian atau *daily politics* ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara yang termuat di wordpress resmi PPLP-KP yaitu [www.kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com](http://www.kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com), Pak Widodo selaku koordinator lapangan PPLP-KP mengatakan menolak tegas status pakualaman ground. Dalam wawancara tersebut Pak Widodo juga mengatakan bahwa untuk menolak status pakualaman ground dengan alasan yang kuat yaitu UUPA. Dalam UUPA menyatakan bahwa jika lahan telah digarap selama 20 tahun akan menjadi hak penggarap (petani). Lalu dengan Paku Alam mau menguasai tanah tersebut dengan cara memberlakukan status tanah magersari, Pak Widodo mempertanyakan apa dasarnya dan mengingatkan bahwa pemerintah daerah Yogyakarta juga masih bagian dari Indonesia maka harus dengan hukum Indonesia.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis, Pak Widodo mengatakan :

“saya tidak mengakui hukum-hukum tersebut (Perdais No 2 Tahun 2017), saya juga tidak tahu apa itu hukum magersari. Ngga ada pakualaman ground disini.”

Dengan ungkapan Pak Widodo tersebut menjelaskan bahwa Pak Widodo dan kawan-kawan PPLP-KP tidak mengakui Perdais No 2 Tahun 2017. Pak Widodo tidak mengakui adanya tanah magersari dan klaim Pakualaman Ground. Mereka tetap mengakui bahwa tanah yang sudah puluhan tahun untuk bertanam miliknya sah karena mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan tidak menerima apapun kebijakan pemerintah contoh hak magersari atau sebagainya.

Pada tahun 2019 ini adalah tahun politik bagi Indonesia. Pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan pemilu serentak meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Para calon legislator melakukan kampanye di daerah pilihannya masing-masing. Sehingga pesta demokrasi dirasakan semua elemen masyarakat.

Namun tidak bagi PPLP-KP. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah membuat PPLP-KP tidak menaruh perhatian dalam riuhnya politik. Dalam dialog yang dilakukan sehari-hari tidak ada yang menyangkut obrolan politik. Bahkan bisa dikatakan sebagai golongan putih (golput).

Pada perayaan hari lahir PPLP-KP yang ke-13, salah satu rangkaian acaranya adalah orasi perjuangan. Semua orang diperbolehkan untuk berorasi di atas panggung. Salah satu yang berpartisipasi adalah Ibu Kawit. Ibu Kawit memberikan salah satu pandangannya yaitu tentang pemilu. Ibu Kawit mengatakan :

“aku sudah tidak peduli dengan pemilu. Ngonono kok dikon nyoblos siji opo loro, ndak mending ngliwet ning omah”

Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada lagi kepedulian terhadap pemilu. Ditambah lagi setelah Ibu Kawit mengatakan hal tersebut, disambut tepuk tangan meriah oleh masyarakat sekitar dan penonton lain. Ungkapan kebencian terhadap pemerintahan juga tidak lepas dari orasi Ibu Kawit. Bahkan Ibu Kawit memaki-maki penguasa, seperti yang dikatakan :

“mereka para penguasaan memang bajingan bajingan”,

Yang diungkapkan ibu Kawit adalah bentuk kekesalannya terhadap para penguasa pemerintah di negeri ini yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

## **2. Praktik Politik Yang Tersembunyi**

PPLP-KP dalam menjaga politik perlawanannya dilakukan dengan strategi yang sangat matang. Mereka melakukan rapat tertutup khusus anggota PPLP-KP. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh anggota PPLP-KP. Rapat tersebut bersifat insidental. Rapat tersebut diadakan jika ada keperluan atau pembahasan mengenai PPLP-KP. Rapat tersebut bersifat tertutup karena para solidaritas pun tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat tersebut.

Pembahasan dalam rapat bisa mengenai apa saja. Mas Adi selaku solidaritas membocorkan sedikit apa yang sering dibahas di rapat. Seperti yang diungkapkan :

“banyak yang dibahas dalam rapatnya. Seperti apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Gerakannya apa. Contoh aja kaya skripsi mbak. Pasti dulu dimintain proposalnya dulu. Nah proposal itu di rapatin dulu dengan anggota yang lain, mbak diijinin untuk penelitian atau tidak”

Tidak hanya membahas bagaimana PPLP-KP kedepannya, namun hal-hal seperti ada yang ingin meneliti tentang PPLP-KP pun mereka bahas dahulu didalam rapat. Maka dari itu, diadakan rapat tertutup tersebut untuk menjaga keutuhan PPLP-KP dari pihak luar.

Dalam PPLP-KP *daily politics* banyak ditemukan. PPLP-KP tidak mengakui tentang klaim Tanah Paku Alam di lahan garapannya dan menganggap lahan tersebut sah miliknya. Disamping tidak mengakui klaim

Tanah Pakualaman, PPLP-KP juga sudah peduli dengan pemerintah. Menjelang pemilu, anggota PPLP-KP memilih golput karena dirasa siapapun penguasanya akan tidak memengaruhi apapun. Untuk menjaga politik perlawanannya, PPLP-KP menjaganya dengan mengadakan rapat tertutup. Segala strategi atau pembahasan penting dibahas pada rapat tertutup yang hanya anggota PPLP-KP saja yang tahu.